

RINGKASAN

Mahya Nazira 220510105 ANALISIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PEMERINTAH DAERAH KOTA LHOKSEUMAWE DALAM PROYEK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Dr. Arnita, S.H., M.H. dan Fauzah Nur Aksa, S. Ag., M.H.

Air merupakan kebutuhan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Pemerintah Kota Lhokseumawe sendiri telah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan layanan air minum melalui pembangunan Proyek Sistem Penyediaan Air Minum. Namun, hingga kini proyek SPAM tersebut belum memberikan manfaat sebagaimana yang diharapkan, sehingga menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana tanggung jawab Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam mengelola proyek SPAM. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bentuk tanggung jawab hukum Pemerintah Daerah Kota Lhokseumawe dalam penyelenggaraan SPAM.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif melalui pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan isu hukum yang dihadapi untuk mengkaji fenomena sosial dengan melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, dan memengaruhi kehidupan masyarakat. Penelitian ini bersifat deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh gambaran lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku ditempat tertentu.

Penyelenggaraan SPAM di Kota Lhokseumawe tetap menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah meskipun dilaksanakan melalui kerja sama dengan PT Toya Perdana Lhokseumawe. Karena proyek masih dalam masa pelaksanaan, PT Toya Perdana belum dapat dinyatakan wanprestasi. Oleh sebab itu, Pemerintah Daerah perlu memastikan pengawasan dan percepatan penyelesaian proyek agar hak masyarakat atas air bersih segera terpenuhi. Pemerintah Daerah tetap bertanggung jawab atas pelayanan air minum, sementara PDAM dan PT Toya Perdana Lhokseumawe menjalankan perannya masing-masing.

Pemerintah Daerah tetap berkewajiban memastikan pengawasan, akuntabilitas, dan percepatan penyelesaian proyek agar pelayanan air minum segera dapat dinikmati masyarakat, sehingga hak masyarakat atas air bersih dapat terpenuhi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Saran yang dapat penulis berikan Pemerintah Kota Lhokseumawe sebaiknya mempercepat operasionalisasi SPAM melalui penyelesaian kendala teknis, administratif, serta penguatan kapasitas dan tata kelola PDAM agar pelayanan air minum dapat segera berjalan optimal, serta perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan SPAM melalui pelaporan berkala, pengawasan, serta edukasi kepada masyarakat mengenai hak atas layanan air minum.

Kata Kunci: Sistem Penyediaan Air Minum, Tanggung Jawab Hukum, Pelayanan Publik

SUMMARY

Mahya Nazira 220510105 ***ANALYSIS OF THE LEGAL LIABILITY OF THE LHOKSEUMAWE CITY LOCAL GOVERNMENT REGARDING THE DRINKING WATER SUPPLY SYSTEM PROJECT***

Dr. Arnita, S.H., M.H. and Fauzah Nur Aksa, S. Ag., M.H.

Water is a basic necessity that is inseparable from human life. The Lhokseumawe City Government has demonstrated its commitment to improving drinking water services through the construction of a Drinking Water Supply System (SPAM) project. However, to date, the SPAM project has not delivered the expected benefits, raising questions about the extent of the Lhokseumawe City Government's responsibility in managing the SPAM project. This study aims to identify the nature of the Lhokseumawe City Government's legal responsibilities in the implementation of the drinking water supply system.

This study employs a normative legal research method using a sociological approach to examine the law or a social phenomenon by observing how the law is applied, complied with, and influences people's lives. This is a descriptive study aimed at obtaining a comprehensive picture of the prevailing legal conditions in a specific location.

This study shows that the management of the water supply system in Lhokseumawe City remains the responsibility of the local government, even though it is carried out in collaboration with PT Toya Perdana Lhokseumawe. Since the project is still in progress, PT Toya Perdana cannot yet be deemed to be in breach of contract. Therefore, the local government needs to ensure oversight and expedite the project's completion so that the community's right to clean water is fulfilled as soon as possible. The local government remains responsible for drinking water services, while PDAM and PT Toya Perdana Lhokseumawe carry out their respective roles.

Local governments remain obligated to ensure oversight, accountability, and the accelerated completion of projects so that the public can promptly benefit from drinking water services, thereby fulfilling the public's right to clean water in accordance with applicable laws and regulations. The author recommends that the Lhokseumawe City Government expedite the operationalization of the drinking water supply system by resolving technical and administrative obstacles and strengthening the capacity and governance of the municipal water utility (PDAM) so that drinking water services can operate optimally as soon as possible. Additionally, there is a need to enhance transparency and accountability in the management of the drinking water supply system through periodic reporting, oversight, and public education regarding the right to drinking water services.

Keywords: *Drinking Water Supply System, responsibility, Public Service*